



Apropriasi dan Anarki: Memahami *State of Nature* sebagai Perang Interpretasi dan Kebutuhan akan Kebenaran Formal

Chris Ruhupatty

Universitas Indonesia

chrisruhupatty@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menyingkap dinamika transisi kebenaran dari ranah personal menuju ranah institusional dengan menggunakan pendekatan hermeneutika apropriasi. Selama ini, ketegangan dalam *state of nature* sering kali hanya dipandang sebagai konflik fisik, tetapi artikel ini berargumen bahwa konflik tersebut pada dasarnya adalah sebuah anarki hermeneutika. Dengan mengintegrasikan pemikiran Dilthey, Ricoeur, Searle, Foucault, dan Butler, artikel ini mengajukan teori a-propriasi untuk menjelaskan bagaimana esensi realitas yang muncul dalam kesadaran ditransformasikan menjadi kebenaran formal. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebenaran institusional bukanlah representasi absolut dari realitas, melainkan sebuah kebenaran alternatif yang lahir dari permainan apropriasi yang tidak pernah final. Oleh karena itu, institusi harus senantiasa terbuka terhadap alteritas guna menghindari kekerasan hegemonik. Artikel ini memberikan refleksi bagi situasi politik global bahwa perbedaan pandangan adalah perwujudan kebenaran alternatif yang seharusnya memperkaya, bukan mengancam, kehidupan bersama.

Keywords

Apropriasi; alteritas; Kebenaran Alternatif; Anarki Hermeneutika; hermeneutika alternatif; institusi; *state of nature*.

Pendahuluan

Menyingkap kebenaran merupakan tugas fundamental filsafat yang diemban sejak era klasik hingga kontemporer. Hal ini ditandai oleh sejarah diskursus mengenai kebenaran yang menjadi fondasi bagi realitas melalui berbagai pendekatan teoretis. Secara khusus, artikel ini mengkaji bagaimana pemahaman dan eksplanasi mengenai kebenaran membentuk struktur kehidupan

sosial. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa kebenaran senantiasa bersifat personal, tetapi secara simultan memiliki dimensi sosial dan institusional. Dengan perkataan lain, artikel ini hendak menegaskan bahwa aktivitas menyingkap serta mendistribusikan kebenaran dalam relasi interpersonal merupakan ciri dari eksistensi manusia.

Dalam tradisi filsafat politik klasik, transisi kebenaran dari ranah personal menuju struktur institusional seringkali dipetakan melalui konsep *State of Nature* atau keadaan alamiah. Thomas Hobbes, dalam *magnum opus*-nya *Leviathan* (1651), membedah kondisi pra-institusional ini sebagai anarki fisik yang didorong oleh benturan insting materialistik manusia. Bagi Hobbes, tanpa adanya kekuasaan bersama yang ditakuti, manusia terjebak dalam kondisi perang semua melawan semua (*bellum omnium contra omnes*), di mana hidup menjadi “soliter, miskin, biadab, dan singkat.”¹ Dalam perspektif ini, kebenaran personal hanyalah manifestasi dari nafsu (*appetite*) dan ketakutan (*aversion*) individu yang saling berbenturan, sehingga membutuhkan otoritas absolut untuk memformalkan ketertiban.

Berbeda dengan pendekatan mekanistik Hobbes, John Locke dalam *Two Treatises of Government* (1689) memandang keadaan alamiah sebagai ruang kebebasan dan kesetaraan yang diatur oleh hukum kodrat (*law of nature*). Locke berargumen bahwa akal budi—yang ia identifikasi sebagai hukum tersebut—mengajarkan umat manusia bahwa tidak ada yang boleh mencelakai orang lain dalam hidup, kebebasan, maupun hak miliknya.² Meski demikian, Locke mengakui adanya ketidakpastian fungsional dalam kondisi ini karena absennya hakim yang tidak memihak untuk menyelesaikan sengketa interpretasi atas hukum kodrat tersebut.³ Artikel ini berupaya melampaui kedua pembacaan tersebut dengan mengajukan argumen bahwa ketidakpastian dalam *State of Nature* pada hakikatnya adalah sebuah “anarki interpretasi” yang berakar pada

keberagaman apropriasi personal manusia atas esensi realitas.

Sebagai alternatif terhadap kebuntuan interpretatif dalam *State of Nature*, artikel ini mengajukan sebuah pendekatan hermeneutika di bawah kerangka teori apropriasi. Pendekatan ini memandang bahwa cara menyingkap kebenaran realitas yang paling khas bagi manusia berakar pada kemampuan fundamental manusia untuk melakukan apropriasi terhadap penyingkapan esensi realitas yang muncul dalam kesadaran. Berbeda dengan sekadar menerima realitas secara pasif, prinsip apropriasi memungkinkan manusia untuk secara aktif mendaku dan memanipulasi esensi tersebut ke dalam bentuk-bentuk pemahaman yang personal dan bermakna.

Dalam tradisi hermeneutika, sebagaimana ditekankan Paul Ricoeur, apropriasi (*appropriation*) merujuk pada proses ketika makna sebuah teks tidak lagi menjadi milik eksklusif pengarangnya, melainkan diambil alih oleh pembaca untuk menjadi bagian dari pemahaman dirinya sendiri. Secara sederhana, memahami teks bukan sekadar “mengetahui arti” secara kognitif, melainkan upaya menghidupkan kembali makna tersebut dalam konteks diri agar relevan secara eksistensial.

Namun, artikel ini memperluas cakupan tersebut dengan memosisikan realitas itu sendiri sebagai “teks” yang menuntut apropriasi. Dalam konteks ini, anarki interpretasi dipahami sebagai konsekuensi logis dari keberagaman narasi apropriasi individu atas esensi realitas yang sama. Oleh sebab itu, pembentukan institusi sosial bukan sekadar mekanisme kontrol fisik, melainkan sebuah proses formalisasi yang berupaya menyinergikan berbagai

¹ Thomas Hobbes, *Leviathan* dalam *Hobbes's Leviathan* (Oxford: Clarendon Press, 1909), hal. 87–8.

² John Locke, *Two Treatises of Government* (London: J. M. Dent & Sons, Ltd., 1962), hal. 118–9.

³ *Ibid.*, hal. 180.

apropriasi personal tersebut menjadi satu struktur “kebenaran formal” yang dapat dikomunikasikan secara kolektif.

Kristalisasi apropiasi personal menjadi kebenaran formal di dalam institusi bukanlah sebuah proses tanpa risiko. Tensi muncul ketika institusi sosial atau negara cenderung mengabsolutkan kebenaran formalnya, sehingga berpotensi mengasingkan esensi dunia-hidup (*Lebenswelt*) dan membungkam “alteritas” atau kebenaran alternatif yang dibawa oleh persona lain. Untuk membedah bagaimana proses penyingkapan kebenaran ini bekerja secara sistematis, artikel ini akan menggunakan metode hermeneutika sebagai pisau analisis. Pembahasan dimulai dengan menelusuri akar hermeneutika dalam pemikiran Wilhelm Dilthey yang menekankan pada pemahaman subjektif (*verstehen*), hingga kemudian beralih pada kontribusi Paul Ricoeur mengenai pendekatan apropiasi dalam pembacaan teks. Melalui penelusuran sejarah metode ini, teori a-propriasi akan diposisikan sebagai kelanjutan kritis yang mampu menjelaskan dinamika antara kesadaran personal, stabilitas institusional, dan pengakuan terhadap yang-lain.

Metode Penelitian: Hermeneutika sebagai Penyingkapan Realitas

Artikel ini menerapkan metode hermeneutika untuk membedah dialektika antara kebenaran personal dan kebenaran institusional. Hermeneutika dipilih bukan sekadar karena kemampuannya dalam melampaui eksplanasi kausal (*erklären*) menuju pemahaman mendalam (*verstehen*) atas makna di balik fenomena sosial, melainkan juga karena hermeneutika merupakan pendekatan yang bersifat hakiki

bagi manusia. Sebagai makhluk penafsir, manusia senantiasa berada dalam proses memaknai realitas, sehingga penggunaan metode ini menjadi relevan untuk menyingkap bagaimana struktur kesadaran personal bertransformasi menjadi struktur sosial yang formal.

1. Wilhelm Dilthey: *Verstehen* dan Dunia-Hidup (*Lebenswelt*)

Fondasi metodologis dalam artikel ini berakar pada pemikiran Wilhelm Dilthey yang membedakan secara tegas antara ilmu-ilmu alam (*Naturwissenschaften*) dan ilmu-ilmu kemanusiaan (*Geisteswissenschaften*). Bagi Dilthey, manusia tidak dapat dipahami melalui hukum-hukum mekanistik yang bersifat eksternal, melainkan melalui pengalaman hidup yang dihayati secara internal (*Erlebnis*). Metode utama dalam ilmu kemanusiaan adalah “*Verstehen*” (pemahaman), yaitu sebuah proses di mana kesadaran manusia menangkap makna dari ekspresi hidup orang lain sebagai bentuk penyingkapan kebenaran yang bersifat subjektif tapi universal.

Dilthey menulis:

“Kita menjelaskan alam, tetapi kita memahami kehidupan mental.”⁴

Dalam konteks artikel ini, pendekatan Dilthey digunakan untuk menunjukkan bahwa sebelum adanya formalisasi dalam bentuk negara atau institusi, terdapat kebenaran personal sebagai apropiasi terhadap esensi dunia-hidup yang muncul sebagai fenomena dalam kesadaran. Kehidupan psikis manusia inilah yang menjadi dasar bagi keberadaan sosial. Dengan demikian, hermeneutika Dilthey memungkinkan artikel ini untuk melihat *State of Nature* bukan sebagai ruang hampa

⁴ Wilhelm Dilthey, *Ideas about a Descriptive and Analytical Psychology* dalam *W. Dilthey Selected*

Writings, Ed. H. P. Rickman (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), hal. 89.

makna, melainkan sebagai ruang di mana kebenaran sedang disingskapkan secara personal oleh individu-individu sebagai makhluk yang memiliki sejarah dan kesadaran.

2. Paul Ricoeur: Apropriasi sebagai Metode Interpretasi

Paul Ricoeur memperluas cakupan hermeneutika dengan membawa fokus pada teks dan simbol. Dalam pemikirannya, Ricoeur memperkenalkan apropriasi bukan sekadar sebagai tindakan subjektif yang acak, melainkan sebagai sebuah metode untuk menjembatani jarak (*distanciation*) antara makna yang terfiksasi (teks/institusi) dengan subjek pembaca. Bagi Ricoeur, apropriasi adalah upaya untuk “menjadikan milik sendiri apa yang sebelumnya asing.”

Ricoeur menjelaskan tujuan dari metode ini dalam salah satu esainya:

“Melalui ‘apropriasi’, saya memahami ini: bahwa interpretasi atas teks memuncak pada interpretasi-diri subjek yang sejak saat itu memahami dirinya dengan lebih baik.”⁵

Dalam kerangka artikel ini, metode Ricoeur digunakan untuk menjelaskan bagaimana manusia memahami kebenaran realitas. Apropriasi dalam konteks Ricoeurian menunjukkan bahwa kebenaran objektif mengenai realitas bernaung di dalam dan melalui struktur teks; pembaca mendaku kebenaran yang menyingkapkan dirinya di dalam teks tersebut, lalu mewujudkannya melalui perspektif dan tindakan. Secara sederhana, apropriasi dalam ranah hermeneutika teks adalah proses menjadikan makna teks menjadi milik pembaca, di mana teks tidak lagi berhenti pada maksud penulisnya, melainkan dihidupkan kembali oleh pembaca dalam

konteks dirinya agar relevan secara eksistensial. Memahami teks, dalam hal ini, bukan sekadar “mengetahui arti,” melainkan mengalami dan menginternalisasi makna tersebut.

Artikel ini, di sisi lain, memperluas logika tersebut dengan memosisikan apropriasi sebagai prinsip dasar yang dimiliki manusia untuk memahami dan menjelaskan esensi realitas secara luas. Dalam cakupan ini, realitas atau fenomena yang menyingkap dalam kesadaran dipandang sebagai “teks” primer yang menuntut apropriasi—di mana teks atau bahasa, bersama dengan karya seni dan teknologi, merupakan perwujudan dari apropriasi terhadap esensi realitas yang muncul dalam kesadaran. Alhasil, setiap pemahaman manusia tidak membawa makna objektif tentang realitas secara langsung, melainkan membawa tafsir—atau dalam hal ini, apropriasi—atasnya. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan menunjukkan bagaimana kebenaran personal bertransformasi menjadi kebenaran formal atau institusional di dalam permainan apropriasi terhadap esensi realitas tersebut.

3. Teori A-propriasi: Evolusi Kebenaran dan Pengakuan Alteritas

Sebagai sintesis terakhir, artikel ini menerapkan teori a-propriasi untuk menunjukkan bahwa hermeneutika—dalam arti apropriasi—adalah metode yang khas dari kebenaran manusia. Dalam perspektif ini, kebenaran formal dan institusional tidak dipandang sebagai representasi absolut dari realitas, melainkan sebagai salah satu bentuk kebenaran alternatif atas esensi realitas yang telah diformalisasi. Karena ia berakar pada prinsip apropriasi yang dinamis, maka kebenaran institusional secara ontologis tidak bersifat final. Oleh

⁵ Paul Ricoeur, *What is a text? Explanation and understanding* dalam *Paul Ricoeur Hermeneutics & the*

Human Sciences, Ed. John B. Thompson (Cambridge: Cambridge University Text, 1982), hal. 158.

sebab itu, artikel ini berargumen bahwa kebenaran formal dan institusional tidak boleh menutup diri atau bersikap dogmatis terhadap “kebenaran yang-lain” (alteritas). Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika ini, artikel ini menyingkap proses transformasi kebenaran realitas: berawal dari penyingkapan esensi pada kesadaran, menjadi kebenaran personal melalui apropriasi, hingga akhirnya berevolusi menjadi kebenaran formal dan institusional. Melalui alur metodis ini, setiap bentuk institusi sosial tetap memiliki kewajiban moral untuk mengakui keberagaman apropriasi personal sebagai asal-usul keberadaannya.

Permainan Apropriasi: Evolusi Kebenaran Personal menjadi Kebenaran Institusional dan Diskursus Keterbukaan

Analisis dalam bagian ini berupaya menyingkap mekanisme di mana kebenaran personal yang lahir dari penyingkapan esensi realitas bertransformasi menjadi struktur yang lebih ajeg dan kolektif. Evolusi ini dipahami sebagai sebuah “permainan apropriasi,” di mana setiap individu tidak hanya mendaku makna bagi dirinya sendiri, tetapi juga terlibat dalam negosiasi makna di ruang publik. Secara konseptual, istilah ini merupakan cara untuk memahami dinamika hidup antara subjek dan objek dengan mengombinasikan gagasan apropriasi Paul Ricoeur dan konsep permainan (*Spiel*) dari Hans-Georg Gadamer. Dalam pandangan Gadamer, memahami bukanlah aktivitas sepihak yang dikuasai subjek, melainkan sebuah proses di mana pemain “terserap” ke dalam struktur permainan itu sendiri, sebab subjek sesungguhnya dari permainan bukanlah pemain, melainkan permainan itu sendiri.⁶ Melalui gerak bolak-balik

menyerupai dialog ini, subjek tidak sepenuhnya bebas tapi juga tidak pasif; ia “ikut bermain” dalam medan makna yang sudah ada—baik itu teks, tradisi, maupun realitas—hingga makna tersebut akhirnya diappropriasi atau diinternalisasi agar relevan secara eksistensial. Dalam konteks artikel ini, realitas diposisikan sebagai medan permainan tersebut, di mana negosiasi antar-apropriasi personal yang terkait pada aturan main kolektif inilah yang kemudian membentuk dasar bagi lahirnya kebenaran formal atau institusional.

Transisi dari kebenaran personal menuju kebenaran institusional bukanlah sebuah akhir dari interpretasi, melainkan sebuah tindakan formalisasi hermeneutis yang bertujuan menciptakan stabilitas fungsional di tengah anarki interpretasi. Analisis ini pertama-tama akan menggunakan pemikiran John Searle untuk membedah bagaimana logika formalisasi tersebut mengonstruksi realitas sosial melalui kesepakatan kolektif. Selanjutnya, pembahasan akan menyoroti tensi yang muncul ketika stabilitas institusional tersebut berhadapan dengan “alteritas” melalui perspektif Foucault dan Butler. Pada akhirnya, diskursus ini bermuara pada sebuah proposisi tentang keterbukaan: bahwa kebenaran institusional, sebagai hasil dari evolusi apropriasi, pada hakikatnya adalah kebenaran alternatif yang harus selalu membuka diri terhadap penyingkapan esensi realitas yang terus mengalir dalam kesadaran dan kehadiran yang-lain.

1. Logika Formalisasi: Fakta Institusional John Searle

Dalam kerangka “permainan apropriasi,” transisi dari kebenaran personal menuju

⁶ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, Penerj. Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall (London: Continuum, 2006), hal. 102–3.

kebenaran institusional merupakan sebuah konsekuensi logis agar kehidupan bersama tetap fungsional. John Searle, dalam bukunya *The Construction of Social Reality* (1995), menjelaskan bahwa institusi sosial bukanlah sesuatu yang bersifat alami, melainkan hasil dari intensionalitas kolektif. Melalui mekanisme ini, manusia memberikan fungsi pada suatu fenomena yang melampaui sifat fisiknya melalui aturan konstitutif dengan formula: “X dihitung sebagai Y dalam konteks C.”

Dalam perspektif artikel ini, X dipandang sebagai wujud dari apropriasi personal atas esensi realitas, yang kemudian melalui kesepakatan atau pengakuan kolektif, diformalisasikan menjadi Y—yakni kebenaran institusional atau hukum yang berlaku dalam konteks C. Searle menegaskan bahwa keberadaan realitas sosial ini sepenuhnya bergantung pada kesepakatan manusia untuk “percaya” dan “menerima” fungsi tersebut secara kolektif.

Searle menjelaskan:

“Ada bagian-bagian dari dunia nyata, fakta-fakta objektif di dunia, yang hanya menjadi fakta karena kesepakatan manusia. Dalam arti tertentu, ada hal-hal yang eksis hanya karena kita percaya bahwa hal-hal itu eksis.”⁷

Evolusi ini menunjukkan bahwa kebenaran institusional pada hakikatnya adalah apropriasi kolektif yang telah dikunci atau diformalisasi untuk menciptakan stabilitas. Bagi Searle, realitas institusional ini “nyata” secara objektif karena bersumber dari intensionalitas manusia. Dengan demikian, pemikiran Searle membantu kita memahami bahwa “kebenaran formal” di dalam negara hanyalah sebuah hasil manipulasi atau

apropriasi terhadap realitas yang disepakati bersama demi menghindari anarki interpretasi. Namun, karena ia hanyalah “fakta berdasarkan kesepakatan,” maka secara fundamental ia tetap bersifat alternatif dan tidak pernah bisa sepenuhnya menggantikan esensi realitas yang sesungguhnya.

2. Tensi Institusional: Rezim Kebenaran dan Subversi Alteritas

Meskipun formalisasi melalui fakta institusional memberikan stabilitas, proses ini sering kali melahirkan tensi ketika kebenaran formal mulai mengklaim dirinya sebagai kebenaran absolut yang tunggal. Michel Foucault memberikan kritik tajam terhadap fenomena ini melalui konsep “Rezim Kebenaran” (*Regime of Truth*). Bagi Foucault, setiap institusi tidak hanya mengelola keteraturan, tapi juga memproduksi diskursus yang mendikte apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Kebenaran dalam institusi bukanlah esensi realitas yang murni, melainkan hasil dari relasi kuasa yang menormalisasi subjektivitas tertentu dan menyingkirkan yang lain.

Foucault menyatakan dalam *Power/Knowledge*:

“Kebenaran adalah hal dari dunia ini: ia dihasilkan hanya melalui berbagai bentuk pemaksaan. Dan ia menginduksi efek-efek kekuasaan yang teratur. Setiap masyarakat memiliki rezim kebenarannya, ‘politik umum’ tentang kebenaran.”⁸

Namun, kekakuan institusi dalam “melarang” atau membatasi kebenaran yang-lain justru menciptakan celah bagi perlawanan. Di sinilah pemikiran Judith Butler menjadi sangat relevan untuk

⁷ John Searle, *The Construction of Social Reality* (New York: The Free Press, 1995), hal. 1.

⁸ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews & Other Writings 1972-1977*, Ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), hal. 131.

menjelaskan dinamika alteritas. Butler berargumen bahwa struktur formal atau norma yang kaku tidak pernah benar-benar mampu membungkam kebenaran personal secara total. Sebaliknya, setiap bentuk pembatasan institusional justru menjadi arena di mana subversi itu diproduksi. Dalam *Bodies That Matter* (1993), Butler menekankan bahwa sebuah tatanan yang bersifat melarang pada saat yang sama justru:

“... bekerja, bahkan mengeksploitasi larangan tersebut demi munculnya berbagai kemungkinan bagi pengulangan dan subversinya.”⁹

Dalam konteks “permainan apropriasi,” kutipan ini menegaskan bahwa kebenaran formal yang bersifat membatasi sebenarnya sedang “mengeksploitasi” eksistensinya sendiri untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Alteritas—baik yang muncul dari dalam kesadaran individu maupun dari pandangan orang lain—menggunakan celah-celah di dalam formalisasi institusi tersebut untuk muncul kembali sebagai penyingkapan esensi yang lebih segar.

Analisis ini membawa kita pada proposisi utama artikel penelitian: bahwa karena kebenaran institusional terus-menerus digugat oleh pengulangan dan subversi, maka ia tidak pernah bisa menjadi representasi absolut dari esensi realitas. Ia hanyalah sebuah kebenaran alternatif yang bersifat sementara dan harus selalu terbuka terhadap kehadiran alteritas. Dengan demikian, institusi yang sehat bukanlah institusi yang menutup diri dengan keras, melainkan institusi yang mampu mengenali bahwa dirinya sendiri adalah hasil dari evolusi proses apropriasi yang tidak pernah final.

Dengan demikian, permainan apropriasi menyingkapkan bahwa evolusi dari kebenaran personal menuju kebenaran institusional bukanlah sebuah perjalanan menuju kebenaran final, melainkan sebuah strategi eksistensial untuk mengelola keteraturan fungsional, maka kritik Foucault dan Butler mengingatkan bahwa keteraturan tersebut selalu mengandung risiko alienasi terhadap hakikat manusia yang dinamis. Tensi ini membuktikan bahwa institusi tidak pernah bisa berdiri sepenuhnya terpisah dari arus kesadaran personal yang membentuknya. Kebenaran formal yang mencoba memutlakkan dirinya sendiri justru akan terjebak dalam kerapuhan performatifnya, karena ia selalu berhadapan dengan penyingkapan-penyingkapan baru yang tidak bisa selamanya dibatasi oleh sekat-sekat formalitas.

Oleh sebab itu, diskursus keterbukaan menjadi sebuah keharusan ontologis bagi setiap tatanan sosial. Mengakui bahwa kebenaran institusional hanya sebuah “kebenaran alternatif” berarti memberikan ruang bagi alteritas untuk hadir bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sumber pemaknaan yang terus memperkaya kehidupan bersama. Pada akhirnya, melalui lensa hermeneutika apropriasi, stabilitas sebuah institusi tidak lagi diukur dari seberapa keras ia mampu memaksakan kepatuhan, melainkan dari seberapa luas ia mampu membuka diri terhadap penyingkapan esensi realitas yang beragam. Institusi, dalam hal ini, bertransformasi dari sekadar instrumen kekuasaan menjadi ruang dialogis tempat kebenaran personal dan kebenaran kolektif saling menyapa tanpa harus saling meniadakan.

⁹ Judith Butler, *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex”* (New York: Routledge, 1993), hal. 152.

Kesimpulan

Artikel ini berhasil menyingkap bahwa ketegangan antara individu dan institusi berakar pada dinamika interpretasi yang fundamental. Sebagai penutup, artikel ini merumuskan tiga poin esensial mengenai hakikat kebenaran, institusi, dan hubungan kemanusiaan:

1. *State of Nature* sebagai Anarki Hermeneutika

Artikel ini memosisikan hermeneutika dalam prinsip apropriasi sebagai metode dasar yang membentuk pemahaman personal maupun hubungan interpersonal. Penyingkapan esensi realitas di dalam kesadaran menuntut adanya tindakan apropriasi agar realitas tersebut dapat dipahami, dikomunikasikan, dan digunakan dalam konteks hidup bersama. Proses apropriasi ini melibatkan aktivitas mental yang aktif dalam mengolah fenomena mentah menjadi simbol-simbol bermakna. Oleh karena itu, hubungan antar-manusia pada dasarnya adalah hubungan interpretatif, di mana setiap individu berusaha menavigasi dunianya melalui kerangka pemahaman yang mereka bangun sendiri berdasarkan penyingkapan esensi yang mereka alami.

Atas dasar ini, artikel ini memahami *state of nature* bukan sekadar sebagai kondisi anarki fisik atau ketiadaan otoritas politik, melainkan sebagai sebuah kondisi “anarki hermeneutika.” Dalam ruang ini, kebenaran-kebenaran personal masih mengalami proses dialektis untuk menemukan kesetimbangannya di dalam konteks hubungan interpersonal. Anarki terjadi karena adanya keberagaman apropriasi yang belum menemui titik temu fungsional, sehingga setiap individu terjebak dalam upaya mempertahankan validitas tafsirannya masing-masing. Dengan

demikian, transisi menuju tatanan sosial bukan lagi dipandang sebagai penyerahan hak fisik semata, melainkan sebuah upaya kolektif untuk mensinkronisasi berbagai apropriasi personal ke dalam sebuah kesepakatan makna bersama.

2. Kebenaran Alternatif dan Dasar Alteritas

Hermeneutika di dalam prinsip apropriasi dipahami sebagai sebuah “hermeneutika alternatif,” yang merupakan pendekatan untuk mewujudkan kebenaran-kebenaran yang bersifat alternatif, bukan kebenaran final atau absolut. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap hasil pemahaman adalah produk dari keterbatasan perspektif manusia dalam menangkap luasnya esensi realitas. Oleh sebab itu, keterbukaan terhadap alteritas merupakan sebuah dasar yang tidak terelakkan dari pemahaman dan penjelasan tentang esensi realitas yang muncul dalam kesadaran. Menutup diri terhadap pandangan yang lain berarti mematikan dinamika penyingkapan itu sendiri, yang pada akhirnya akan menjebak individu dalam kebenaran dogmatis yang semu.

Hal ini didasari oleh fakta ontologis bahwa esensi realitas yang menyingkap dalam kesadaran pada hakikatnya adalah alteritas itu sendiri. Realitas selalu hadir sebagai sesuatu yang “lain,” yang menantang pra-pemahaman individu dan menuntut untuk terus-menerus diappropriasi kembali. Dengan demikian, apropriasi dan keterbukaan bukanlah dua kutub yang saling bertentangan, melainkan prinsip dasar yang menyatu dalam setiap tindakan pemahaman. Jika apropriasi adalah cara kita “memiliki” makna, maka keterbukaan adalah pengakuan bahwa makna tersebut selalu bersumber dari sesuatu yang melampaui diri kita, sehingga kebenaran

yang dihasilkan akan selalu bersifat terbuka dan tidak pernah mencapai titik henti.

3. Refleksi Politik Global: Menolak Kekerasan terhadap Alteritas

Dalam refleksi terhadap situasi politik global yang sering diwarnai oleh peperangan dan konflik, fenomena kekerasan dipandang sebagai sebuah kondisi anarki-hermeneutika yang ekstrem. Perang atau kekerasan terhadap alteritas merupakan tanda bahwa kebenaran formal telah dipaksakan menjadi kebenaran tunggal yang absolut. Ketika sebuah institusi atau kelompok merasa memegang kebenaran final, mereka cenderung menganggap setiap perbedaan sebagai ancaman yang harus dieliminasi. Kekerasan ini adalah kegagalan hermeneutis, di mana manusia berhenti melakukan apropriasi yang dialogis dan beralih pada pemaksaan tafsir secara hegemonik.

Artikel ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan seharusnya dipahami sebagai proses perwujudan kebenaran alternatif, yang secara alamiah merupakan bagian dari kekayaan esensi realitas. Jika setiap entitas politik menyadari bahwa kebenarannya hanyalah salah satu bentuk apropriasi yang tidak bersifat final, maka alteritas tidak lagi akan dipandang sebagai musuh yang mengancam stabilitas. Sebaliknya, kehadiran yang-lain menjadi peluang untuk melakukan re-apropriasi terhadap tatanan yang sudah ada agar lebih inklusif. Dengan demikian, kedamaian global hanya mungkin dicapai melalui pengakuan bahwa kebenaran institusional harus selalu berpori dan terbuka terhadap kebenaran-kebenaran alternatif yang dibawa oleh alteritas.

Daftar Pustaka

Butler, Judith. 1993. *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex"*. New York: Routledge.

Dilthey, Wilhelm. 1976. *Ideas about a Descriptive and Analytical Psychology* dalam *W. Dilthey Selected Writings*. Cambridge: Cambridge University Press.

Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews & Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books.

Gadamer, Hans-Georg. 2006. *Truth and Method*. London: Continuum.

Hobbes, Thomas. 1909. *Leviathan* dalam *Hobbes's Leviathan*. Oxford: Clarendon Press.

Locke, John. 1962. *Two Treatises of Government*. London: J. M. Dent & Sons, Ltd.

Ricoeur, Paul. 1982. *What is a text? Explanation and understanding* dalam *Paul Ricoeur Hermeneutics & the Human Sciences*. Cambridge: Cambridge University Text.

Searle, John. 1995. *The Construction of Social Reality*. New York: The Free Press.